

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada Desember 2019, dunia dihebohkan ketika virus corona (SARS-CoV-2) merebak di Wuhan, Tiongkok kemudian dengan cepat menyebar ke berbagai negara. Pada awal Maret 2020, Indonesia mengonfirmasi kasus pertama virus corona, menandai dimulainya serangkaian tindakan untuk menghadapi pandemi yang telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Ketika virus ini menyebar dengan cepat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi dampak kesehatan, sosial dan ekonomi dari pandemi ini. Pada 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan penyakit virus corona (Covid-19) ini sebagai pandemi global. Pengumuman tersebut memperjelas bahwa seluruh dunia perlu bersiap menghadapi dampak yang sangat luas..

Kondisi pandemi Covid-19 telah berdampak sangat besar di Indonesia, baik pada sektor medis maupun perekonomian. Untuk memutus penyebaran virus tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan serangkaian pembatasan sosial, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diikuti dengan kebijakan penerapan pembatasan pergerakan masyarakat (PPKM), yang semakin sulit seiring dengan hal tersebut situasi sosial. Jumlah orang yang terinfeksi virus corona baru akan meningkat. Pembatasan ini berdampak pada hampir semua sektor, namun sektor pariwisata menjadi

sektor yang paling berdampak atas adanya pembatasan pergerakan masyarakat dan penutupan destinasi wisata.

Pandemi COVID-19 berdampak pada aktivitas dan pergerakan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras mencegah penyebaran virus corona melalui kegiatan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kebijakan lain yang diusung pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial secara luas di beberapa wilayah di Indonesia. Ketika jumlah orang yang tertular terus meningkat, pemerintah mulai menggulirkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Pergerakan Masyarakat) berbasis mikro. Kebijakan ini menutup sebagian besar industri pariwisata di Indonesia.

Menurut Wahab, pariwisata merupakan industri baru yang dapat mencapai peningkatan ekonomi pesat di berbagai bidang, termasuk kesempatan kerja, penghasilan, standar hidup serta revitalisasi sektor produktif lain bagi negara tuan rumah pariwisata terkait<sup>1</sup> Undang-Undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009 telah mengungkapkan bahwa pariwisata mencakup berbagai kegiatan pariwisata yang mendapat dukungan dari pemerintah kota, pengusaha, fasilitas dan layanan pemerintah dan kota. Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa peran pariwisata adalah guna mencukupi kebutuhan fisik, mental dan intelektual wisatawan melalui rekreasi dan perjalanan, sekaligus peningkatan pendapatan pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* (jakarta: Pradya Paramita, 2003).

kepentingan rakyat. Potensi wisata yang ada di wilayah tersebut bisa menjadi sumber pendapatan potensial bagi wilayah tersebut. Pariwisata semakin dipandang sebagai alat penting dalam proses pembangunan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, terutama oleh negara-negara berkembang dan wilayah pinggiran seperti Indonesia. Dalam konteks ini, sektor pariwisata memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan, perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, diversifikasi struktur ekonomi, dan lain-lain<sup>2</sup>. Di Indonesia, pariwisata juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pariwisata. Tujuan pariwisata ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran sosial, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan perlindungan alam, lingkungan, ataupun sumber daya. Termasuk sebagai upaya dalam memajukan kebudayaan, mendorong citra negara, meningkatkan kekaguman terhadap negara, menguatkan jatidiri dan persatuan bangsa, serta menguatkan persahabatan antarbangsa. Perkembangan destinasi wisata juga berdampak pada perekonomian, karena pariwisata menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat lokal sehingga pariwisata dapat berdampak pada perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.<sup>3</sup>

Dampak besar dari pandemi Covid-19 bagi sektor pariwisata Indonesia dan berdampak langsung pada pendapatan daerah. Menurut Badan Pusat

---

<sup>2</sup> Eva Rachmawati, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata*, ed. oleh Ilham, 1 ed. (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021).

<sup>3</sup> Katarina dan Noora Fithriana, "Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2017): 120–25.

Statistik, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 akibat pandemi tersebut. Jumlah wisman pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 75,03% dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, jumlah wisatawan nusantara juga mengalami penurunan sebesar 61% dibandingkan tahun yang sama.<sup>4</sup>

Pariwisata merupakan sumber pendapatan nasional dan daerah. Pandemi COVID-19 telah mengurangi pendapatan lokal dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang fokus pada pariwisata. Di Indonesia, industri pariwisata tidak semata-mata dikelola oleh pemerintah pusat, namun setiap daerah bebas mengelola daerahnya berdasarkan sumber daya yang ada, memaksimalkan potensi daerah, dan memanfaatkan kearifan lokal. Kita mengedepankan pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya boleh menjalankan kekuasaan administratif yang bersifat wajib terkait dengan layanan-layanan penting, namun juga menjalankan kekuasaan atas fungsi-fungsi administratif yang bersifat diskresi jika daerah tersebut memiliki sumber daya yang memadai. Salah satu urusan pemerintahan terpilih yang menjadi mandat daerah adalah bidang pariwisata. Tentu potensi wisata dari masing-masing daerah akan berbeda-beda dan memerlukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah daerah.

Tujuan wisatawan mancanegara dan lokal adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah yang berpenduduk 35.516.035 jiwa turut terdampak dengan

---

<sup>4</sup> BPS, "Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2020," *Berita Resmi Statistik*, 2021.

ditutupnya sejumlah destinasi wisata di Jawa Tengah akibat pandemi Covid-19. Sebab, salah satu pendapatan pariwisata lokal mengalami penurunan. Berikut jumlah wisatawan di Jawa Tengah sebelum pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 1 Jumlah Wisatawan di Jawa Tengah  
Sebelum Pandemi Covid-19

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2016	578.924	36.899.776	37.471.979
2017	782.107	40.118.470	40.900.577
2018	677.168	49.943.607	50.620.775
2019	691.699	57.900.863	58.592.562
2020	78.290	22.269.085	22.707.375

Sumber : BPS Jawa Tengah (2021)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa total wisatawan di Jawa Tengah, baik mancanegara maupun lokal, mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2019, jumlah wisatawan di Jawa Tengah mencapai 58.592.562. Sedangkan tahun 2020 turun sebanyak 35.885.187 wisatawan.

Penurunan jumlah wisatawan juga terjadi di berbagai destinasi pariwisata di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Batang. Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis berada di 6o 51' 46” sampai 7o 11' 47” Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19” sampai 110° 03' 06” Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah. Kemudian untuk batas-batasnya, di sebelah Barat berbatasan dengan

Kota dan Kabupaten Pekalongan, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal serta sebelah selatan dengan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Batang yaitu 78.864,16 Ha yang terbagi dalam 15 Kecamatan. Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Batang terdiri atas pantai, dataran rendah dan sebagian pegunungan.

Keberagaman wisata di Kabupaten Batang menjadi faktor penting bagi pemerintah daerah untuk serius dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena potensi ini dapat menarik minat wisatawan asing maupun domestik. Sebab adanya Pandemi Covid-19, jumlah angka pengunjung belum mencapai target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Batang, Wahyu Budi Santoso, menyatakan bahwa pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang mengunjungi berbagai objek wisata di Kabupaten Batang hanya mencapai 700.000 orang, yang berarti jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang sebelumnya ditetapkan, yakni sebanyak 1,6 juta pengunjung.<sup>5</sup>

Dalam prinsip tata kelola pariwisata yang efektif, pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah melibatkan lebih dari sekadar peran pemerintah daerah. Proses ini juga mencakup keterlibatan berbagai pihak lain, seperti sektor swasta dan masyarakat lokal. Kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat krusial untuk menciptakan ekosistem

---

<sup>5</sup> Tribun, "Disparpora Targetkan Satu Juta Orang Wisata ke Batang Tahun 2021," *Tribun Jateng*, 19 Februari 2021, <https://jateng.tribunnews.com/2021/02/19/disparpora-targetkan-satu-juta-orang-wisata-ke-batang-tahun-2021>.

pariwisata berkelanjutan dan pastinya bermanfaat untuk setiap pemangku kepentingan.

Berdasarkan pemaparan mengenai situasi pariwisata pada berbagai daerah di Indonesia khususnya Kabupaten Batang, penulis merasa perlu melakukan kajian untuk menganalisis perkembangan pariwisata Kabupaten Batang pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk dapat mengidentifikasi perkembangan pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, ditentukanlah rumusan masalahnya, yakni Bagaimana Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Batang Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang selama dan pasca pandemi Covid-19.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan melalui adanya hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat dan berkontribusi secara teoritis ataupun praktis. Adapun untuk manfaat teoritisnya yaitu suatu penelitian dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis yaitu suatu penelitian yang

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan dapat memperbaiki praktik yang telah ada.

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharap melalui adanya hasil penelitian ini akan dapat memperkaya pengetahuan dalam studi ilmu sosial dan ilmu politik. Dan khususnya menambah wawasan mengenai pengembangan pariwisata pada tingkat daerah kabupaten/kota.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Diharap akan menjadi dan memperkaya pengalaman dan pengamalan mengenai Analisis Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Batang Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Diharap dapat memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Batang terkait pengembangan pariwisata selama dan pasca pandemi Covid-19.

#### **c. Bagi Pemerintah**

Diharap akan berguna untuk pemerintah daerah sebagai rujukan untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Batang periode selanjutnya. Dan penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan informasi bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang.



## 1.5. Penelitian Terdahulu

Penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu ketika melakukan penelitian mengenai pengembangan pariwisata di wilayah ini. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, tidak ditemukan penelitian yang sesuai dengan nama penelitian penulis. Kendati penulis tetap mengutip beberapa penelitian dalam penelitian tersebut sebagai referensi dan bahan penelitian. Berikut adalah beberapa makalah penelitian terdahulu dalam format jurnal terkait penelitian ini :

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fachri Zaldi Rafsanjani dan Dr. Emy Kholifah R. M.Si (2021)	Kualitatif, deskriptif	Judul : Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebelum kondisi pandemi berfokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya ekowisata. Namun, selama pandemi, terdapat perubahan kebijakan yang signifikan. Setiap tempat wisata di Kabupaten Banyuwangi diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi CHSE ( <i>Clean, Wellbeing, Security, Environment</i> ) yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang juga diterapkan di seluruh destinasi wisata di Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kini lebih fokus pada penerapan protokol kesehatan yang ketat di setiap fasilitas wisata, guna mencegah penyebaran Covid-19 <sup>6</sup> .

---

<sup>6</sup> Fachri Zaldi Rafsanjani dan Emy Kholifah R., "Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Pada Masa Pandemi Covid 19," *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember*, 2021.

2	Violetta Simatupang dan Sukmadi (2021)	Kualitatif-Deskriptif	<p>Judul : Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Bandung Selama Pandemi Covid-19</p> <p>Hasil :  Terpuruknya sektor pariwisata karena pandemi Covid-19 kini mulai memasuki time typical baru. Adapun pariwisata berkelanjutan akan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan pariwisata setelah pandemi berakhir. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, akademisi, dan lainnya, yang dikenal dengan istilah pentahelix<sup>7</sup></p>
3	Riza Muhammad Fadhil, dan Muchamad Zaenuri (2021)	Kualitatif Deskriptif	<p>Judul : Strategi <i>Recovery</i> Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pada Masa <i>New Normal</i></p> <p>Hasil :  Dampak yang diterima sektor pariwisata adalah menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, sebab waktu masyarakat tentu lebih banyak di rumah mengikuti anjuran pemerintah guna meminimalisasi mobilitas. Adapun pandemi Covid-19 telah mengubah banyak kebiasaan, seperti kewajiban memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah berupaya keras untuk menarik wisatawan, supaya masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata dapat terus bertahan. Beberapa langkah yang diambil antara lain bekerja sama dengan berbagai pihak guna menekan kasus Covid-19, mendistribusikan dana hibah pariwisata demi mendukung</p>

<sup>7</sup> Violetta Simatupang dan Sukmadi, "Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Bandung Selama Pandemi Covid-19," *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 6 (2020).

			sektor ini, serta menyelenggarakan acara secara virtual. Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dapat mencapai target yang telah ditetapkan <sup>8</sup> .
4	Sarah Meirina Sari dan Janianton Damanik (2021)	Kualitatif Deskriptif	<p>Judul : Proses Kebijakan Pariwisata di Kota Yogyakarta Pada Kondisi Darurat (Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease-2019</i>)</p> <p>Hasil :</p> <p>Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan sektor pariwisata selama pandemi Covid-19 dinilai kurang matang persiapannya dan tidak konsisten dalam penerapan kebijakan tersebut. Tidak semua destinasi wisata ditutup demi mencegah penyebaran Covid-19, dan keputusan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena hanya didasarkan pada perintah eksekutif. Dampaknya, terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 yang terjadi antara medio Maret-Juni 2020. Terdapat juga perbedaan pandangan di antara pihak eksekutif mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, serta ketidakefektifan sanksi yang diterapkan, yang menghambat implementasi kebijakan. Pemberlakuan surat bebas Covid-19 bagi wisatawan dari zona tertentu juga tak dapat dijadikan jaminan bahwa wisatawan benar-benar bebas dari Covid-19. Kebijakan yang tidak tegas, tidak jelas, dan inkonsisten tentu kemudian akan memicu terjadinya kecenderungan pelanggaran aturan oleh para pelaksana kebijakan, sehingga mengaburkan makna kebijakan yang sebenarnya.<sup>9</sup></p>

<sup>8</sup> Riza Muhamad Fadhil dan Muchamad Zaenuri, "Strategi Recovery Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pada Masa New Normal," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 2, no. 2 (2021): 60–71.

<sup>9</sup> Sarah Meirina Sari, "Proses Kebijakan Pariwisata di Kota Yogyakarta Pada Kondisi Darurat (Masa Pandemi Coronavirus Disease-2019)" (Universitas Gajah Mada, 2021).

Penelitian tentang "Analisis Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Batang Selama dan Pasca Pandemi Covid-19" memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada daerah seperti Banyuwangi, Bandung, dan Yogyakarta. Meskipun semua penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, masing-masing daerah memiliki kebijakan dan fokus yang berbeda. Penelitian di Banyuwangi menekankan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan penerapan protokol kesehatan dengan sertifikasi CHSE, sementara Bandung mengutamakan pentahelix dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dan Yogyakarta berfokus pada strategi recovery sektor pariwisata melalui dukungan dana hibah dan acara virtual.

Penelitian di Kabupaten Batang dapat memberikan pembaruan dengan mengkaji kebijakan yang lebih spesifik untuk daerah tersebut, serta menggali bagaimana Batang mengelola pariwisata selama dan setelah pandemi. Hal ini termasuk penerapan protokol kesehatan dan strategi pemulihan yang sesuai dengan potensi lokal. Selain itu, penelitian ini dapat menyoroti tantangan baru yang dihadapi oleh daerah yang lebih kecil, serta bagaimana kebijakan pusat diimplementasikan di tingkat lokal untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata.

## 1.6. Kerangka Teori

### 1.6.1. Konsep dan Strategi Pengembangan Wisata

Pengembangan pada dasarnya menjadi sebuah proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Menurut Sunaryo, pengembangan pariwisata merupakan proses perubahan yang dilangsungkan secara terencana oleh manusia untuk memperbaiki kondisi pariwisata yang dianggap kurang baik, dan mengarahkannya ke kondisi yang lebih baik atau lebih diinginkan.

Dalam pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah, diperlukan kaidah-kaidah yang dapat menjadi dasar dalam suatu *demonstrate* dan strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan antara lain:

1. Keselarasan visi, misi, tujuan dan indikator prioritas tertentu dalam proses pengembangan pariwisata. Seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran umumnya mendapatkan perumusan berdasarkan kehendak politik otoritas yang memiliki kewenangan.
2. Kesesuaian terhadap dinamika pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik negara dan kawasan internasional, beradaptasi dengan fleksibilitas pengembangan dan pertumbuhan pariwisata.
3. Terjaganya keberlanjutan Pengembangan Pariwisata, termasuk harapan terhadap generasi mendatang.

4. Prediktabilitas dan daya tanggap; ini termasuk perencanaan pengembangan pariwisata, dengan mempertimbangkan situasi di semua wilayah terkait dan dinamika industri pariwisata secara keseluruhan. Perlu memperhatikan, memperhitungkan dan mempertimbangkan situasi di semua bidang yang relevan dan dinamika industri pariwisata secara keseluruhan<sup>10</sup>

Dengan adanya tuntutan, pergeseran pola pikir masyarakat *worldwide* dan perkembangan berbagai isu strategis yang berpengaruh pada perkembangan industri pariwisata, setidaknya telah dikembangkan tiga varian strategis *demonstrate* perencanaan Pengembangan Pariwisata yang sering digunakan sebagai acuan dasar bagi para perencana pengembangan pariwisata. Tiga strategi perencanaan pengembangan pariwisata tersebut adalah:

- 1. Strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan dengan memprioritaskan pada pertumbuhan.**

Strategi ini menekankan pentingnya pertumbuhan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam perencanaan pengembangan. Ini berarti bahwa perencanaan difokuskan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, memperluas kapasitas infrastruktur pariwisata, serta meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Tujuannya adalah menciptakan dampak ekonomi yang positif

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 131.

bagi daerah atau negara melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada hasil kuantitatif, seperti peningkatan kunjungan, investasi, dan pengembangan fasilitas yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

**2. Strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan berbasis pemberdayaan masyarakat.**

Dalam strategi ini, fokus utama adalah pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata. Ini mengandung arti bahwa masyarakat setempat diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, sehingga mereka bisa merasakan manfaat secara langsung. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan, penciptaan peluang pekerjaan di sektor pariwisata, atau pengelolaan usaha pariwisata yang melibatkan komunitas lokal. Dengan demikian, masyarakat lokal menjadi aktor penting dalam industri pariwisata, baik sebagai pengelola destinasi maupun penyedia layanan bagi wisatawan. Ini juga dapat membantu dalam menciptakan pariwisata yang lebih inklusif.

**3. Strategi perencanaan pengembangan pariwisata berbasis Pengembangan Pariwisata berkelanjutan<sup>11</sup>.**

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm.132.

Strategi ini berfokus pada Pengembangan Pariwisata yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya dalam jangka panjang. Pariwisata berkelanjutan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi dan kerusakan alam, serta memastikan bahwa budaya dan tradisi lokal tetap terjaga. Dalam hal ini, pengelolaan pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas daya dukung alam dan sosial, serta melibatkan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) untuk mencapai tujuan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengembangan Pariwisata berkelanjutan juga mencakup pendidikan dan kesadaran bagi wisatawan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan.

Ketiga strategi tersebut memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun dan mengembangkan sektor pariwisata:

1. Pertumbuhan berfokus pada hasil kuantitatif dan ekspansi sektor pariwisata;
2. Pemberdayaan masyarakat menempatkan komunitas lokal sebagai pihak yang terlibat aktif dan mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata;



3. Keberlanjutan mengedepankan pengelolaan yang bijak dan ramah lingkungan serta sosial agar pariwisata dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak nilai-nilai alam dan budaya.

Semua strategi ini bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkembang dengan cara yang seimbang dan bermanfaat untuk banyak pihak. Menurut UNWTO (2017), pariwisata berkelanjutan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: pertama, memberikan pengalaman yang berharga untuk pengunjung serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal lewat pelestarian identitas budaya, pengentasan kemiskinan, ataupun perlindungan lingkungan. Kedua, memastikan pemanfaatan sumber daya dijalankan di tingkat yang ideal untuk mendorong terjadinya pelestarian dan regenerasi alam. Ketiga, mencapai keseimbangan kebutuhan industri pariwisata, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal lewat pembagian manfaat yang adil bagi setiap pemangku kepentingan di daerah tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Suparman, Muzakir, dan Vitayanti Fattah, EKONOMI PARIWISATA: Teori, Model, Konsep dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023).

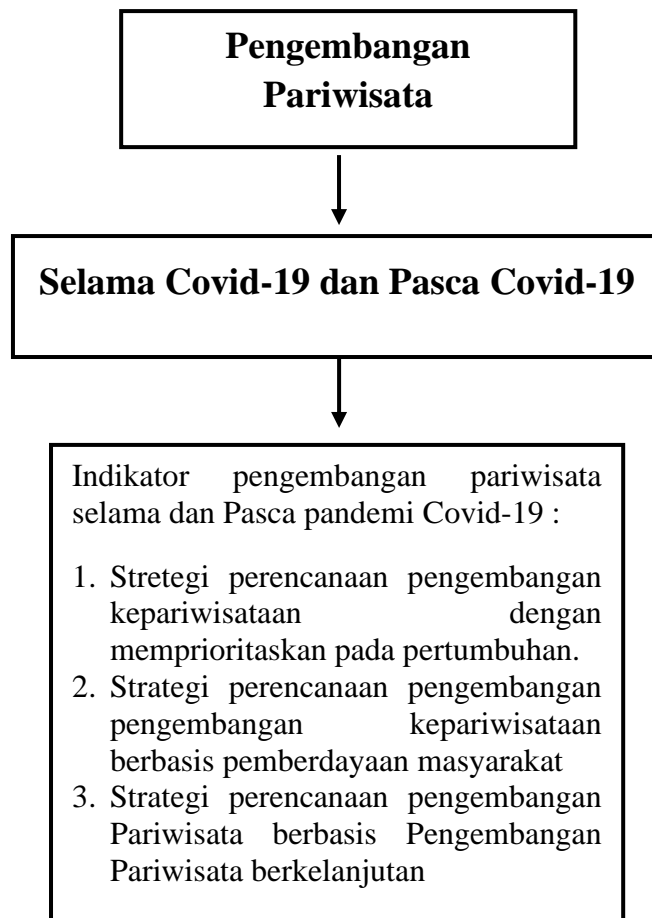
## 1.7. Operasionalisasi Konsep

No.	Indikator	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Sub Indikator
1	Strategi Perencanaan Pengembangan Kepariwisata dengan Memprioritaskan pada Pertumbuhan	Fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, pendapatan pariwisata, dan pengembangan infrastruktur pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Batang dalam merencanakan dan mengembangkan sektor pariwisata dengan memprioritaskan pada peningkatan jumlah wisatawan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi daerah, terutama setelah dampak pandemi COVID-19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kabupaten Batang sebelum dan sesudah pandemi</li> <li>- Pengembangan infrastruktur pariwisata (pengembangan hotel, transportasi, aksesibilitas, fasilitas umum)</li> <li>- Dampak pertumbuhan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Batang (pendapatan daerah, peluang usaha)</li> </ul>
2	Strategi Perencanaan Pengembangan Kepariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Mengutamakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, dengan tujuan meningkatkan	Strategi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Batang untuk melibatkan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan masyarakat Kabupaten Batang dalam pengelolaan destinasi wisata (sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, pengusaha lokal)</li> </ul>

		kesejahteraan masyarakat setempat	Kabupaten Batang dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata, melalui program-program pemberdayaan yang mencakup pelatihan keterampilan dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata lokal.	di sektor pariwisata) - Program pelatihan yang diadakan untuk masyarakat Kabupaten Batang terkait pengelolaan pariwisata, seperti pelatihan tentang kewirausahaan, manajemen destinasi wisata, dan pengelolaan produk lokal - Dampak sosial ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Batang (peningkatan pendapatan, terciptanya lapangan kerja, peningkatan taraf hidup
3	Strategi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berbasis Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Pengembangan pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak alam dan budaya lokal.	Strategi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Batang dalam merencanakan Pengembangan Pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan, baik dari sisi perlindungan lingkungan, pelestarian	- Penerapan praktik ramah lingkungan di destinasi wisata (misalnya pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, konservasi alam dan keanekaragaman hayati) - Pelestarian budaya lokal dalam kegiatan pariwisata (penggunaan produk lokal, pelestarian tradisi dan seni daerah)

			<p>budaya lokal, dan pengelolaan pariwisata yang mendatangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Batang serta ekonomi daerah.</p>	<p>- Kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan, seperti kebijakan pengelolaan destinasi wisata yang tidak merusak alam dan budaya lokal serta mendukung ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Batang</p>
--	--	--	---	--

## 1.8. Kerangka Berpikir



## 1.9. Metode Penelitian

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditentukan penulis sebagai penelitian dengan jenis metode kualitatif deskriptif, atau penelitian berdasarkan kondisi realita dan peneliti sebagai instrument kunci. Melalui jenis penelitian ini, diupayakan pencarian terhadap beberapa data ataupun informasi mengenai atau yang terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Batang dalam pengembangan pariwisata selama dan pasca pandemi Covid-19.

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Batang meliputi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang. Penentuan lokasi penelitian pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Batang dikarenakan dinas tersebut yang berkaitan secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Batang.

### **1.9.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini disebut informan ataupun narasumber. Narasumber atau informan adalah orang yang memiliki informasi berkaitan dengan suatu permasalahan yang ingin diketahui oleh peneliti. Teknik penentuan objek penelitian odalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, atau teknik mencari sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu<sup>13</sup>. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang
2. Kasi SDM dan Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

3. Pengelola Objek wisata

4. Masyarakat/Pengunjung

Informan tersebut yang menjadi subjek penelitian dan sebagai pemberi informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Batang selama dan pasca pandemi Covid- 19.

#### **1.9.4. Sumber dan Jenis Data**

Terdapat dua sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer ialah data informasi atau dokumen asli yang disajikan atau dijelaskan oleh seseorang atau pihak yang hadir pada saat kejadian yang dijelaskan itu terjadi agar mereka bisa menjadi saksi.<sup>14</sup> Data primer yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan melalui hasil obeservasi secara langsung oleh peneliti.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data bahan penelitian yang digambarkan oleh bukan seseorang yang ikut serta dalam kejadian tersebut.<sup>15</sup>

Data sekunder yakni data yang didapatkan peneliti secara tak

---

<sup>14</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

<sup>15</sup> Ibid.

langsung yaitu dengan menggunakan sumber buku, jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya, dan melalui laman site resmi dari pemerintahan.

#### **1.9.5. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan menanyakan secara langsung terhadap informan. Dengan menggunakan teknik wawancara kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui situasi aktual yang terjadi<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Batang sebagai sumber data primer dalam penelitian.

##### **b. Observasi**

Observasi adalah tindakan pengamatan yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu hal baik terencana maupun tidak terencana, baik dalam waktu singkat maupun panjang sehingga

---

<sup>16</sup> Ibid.



dapat mengetahui sumber permasalahan<sup>17</sup>. Peneliti melihat secara langsung di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dalam mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi yaitu pengambilan data yang didapatkan melalui dokumen dokumen yang telah ada sebelumnya.<sup>18</sup> Teknik dalam mengumpulkan data dengan dokumentasi yaitu akan diperoleh data sekunder, dapat berupa foto, gambar dan lain-lain.

#### **1.9.6. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen.<sup>19</sup> Caranya adalah dengan mengatur data berdasarkan kategori dan mendeskripsikan unitnya, mengintegrasikan dan memilah data, memilah mana yang penting dan mempelajarinya dan memperoleh hasil, kemudian membuat kesimpulan. Adapun tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini dengan beberapa cara yaitu :

a. Reduksi data

Dalam melakukan mereduksi sebuah data berarti mengedit, meringkas dari data-data yang ada seperti wawancara. Kemudian

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

menuliskan dengan menggunakan bahasa tulisan dan memilih hal-hal yang dianggap berguna dan penting dan menyesuaikan terhadap fokus apa yang diteliti. Dan data – data yang tidak sesuai dengan penelitian, tidak akan digunakan.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yang biasanya disajikan dalam bentuk uraian atau narasi, bagan, serta kutipan wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Penarikan kesimpulan di awal masih bersifat sementara, apabila tidak ditemukan bukti kuat maka perlu kembali ke lapangan guna mencari data-data yang lebih kuat (valid). Setelah menemukan bukti yang kuat dalam penelitian tersebut maka simpulan akan ditulis secara kredibel.